

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional, (2020). *Pedoman Penetapan Batas Tanah*, Jakarta
- Budianto, (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media, Jakarta
- Djulaeka, & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, Depok
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (Sign), Makassar
- Rahmat Ramadhani, (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Umsu Press, Medan
- Ridwan HR, (2017) *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudrajat, (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Urip Santoso, (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta
-, (2019). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta Timur

Jurnal

Ahmad Zainuri, 2023, "Evaluasi Kebijakan Pertanahan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pertanahan*

Amrin, R. N., Imantaka, A. H., Yanengga, E. T. N., & Maulida, G. C. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Tunas Agraria. Jurnal tunas agraria*

Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*

Fitru, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonom Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*

Hardiwinoto, Sugeng. (2019) "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum Agraria*

Irawan, Bambang, dan Ahmad Suryadi. (2019) Evaluasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*

Julius Sembiring. (2011) Hak Menguasai Negara Atas Tanah: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, *Jurnal Hukum*

Lestari, N. (2021). Status Hak Atas Tanah Pasca Bencana Likuifaksi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Palu. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*

Mamentu, M. S. (2017). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah berkaitan dengan adanya peristiwa alam gempa bumi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*,5(9).

Maria S.W. Sumardjono, (2010), Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Mimbar Hukum*

Nugroho dan Hartati, 2023, Transisi Hunian Sementara menjadi Hunian Tetap: Studi Kasus Pasca Erupsi Gunung Semeru, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, hlm 178.

Prasetyo dan Sumaryo, (2022). Dampak Erupsi Gunung Semeru terhadap Perubahan Fisik Lahan dan Implikasinya pada Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pertanahan Indonesia*

Pratama, Aditya Yudha, dan Sri Rahayu. (2020) Strategi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana melalui Program BPBD. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*

Rahayu, T. D., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Kepastian Hukum Ke Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah. *LITRA: Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 250-266.]
Zainal A., dkk., 2024, Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan, *Communnity Development Journal*.

Ramli Daud. (2018) "Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*

Rudianto, A. (2021). "Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penanganan Bencana Alam dan Penataan Ruang." *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*,

Rudi Hartono, (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Sosial dan Politik*

Sa'adah, U. R., Murwaniyah, M., Pradana, D. I., Masutiah, M., Panggabean, N., & Hamka, H. APLIKASI SENTUH TANAHKU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(1), 4

Santoso, Budi. (2021) "Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Rekonstruksi Batas Tanah." *Jurnal Geografi Indonesia*

Siti Kurnia Widiastuti, (2019). Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, *Jurnal Kebijakan Publik*

Sunarto, R. (2022) "Dampak Kepastian Hukum Tanah terhadap Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*

Susiati, D., & Setiadji, S. (2020). Status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi. *Mimbar Keadilan*

Thabita, G. A. (2023), *STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERKENA BENCANA ALAM* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan Batas Tanah

Internet

[Jenis-jenis Hak atas Tanah dan yang Dapat Menjadi Pemegangnya | Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 5 Desember 2024

[Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum = Social functions on land rights in respect to land procurement for public interest purposes](#), diakses pada tanggal 5 Desember 2024

[Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda | Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 17 Desember 2024

web.bnph.go.id, diakses pada tanggal 18 Desember 2024

<https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGMfJVp>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Meninjau
Huntara Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Semeru, diakses pada
tanggal 10 Februari 2025

Apa Itu BPN: Dasar Hukum, Fungsi, Tugas Badan Pertanahan Nasional, diakses
pada tanggal 22 Februari 2025

[https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-tekanan-
penataan-organisasi-dinas-pertanahan-daerah-untuk-menangani-konflik-
tanah](https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-tekanan-penataan-organisasi-dinas-pertanahan-daerah-untuk-menangani-konflik-tanah), diakses pada tanggal 05 Maret 2025

[https://ppg.dikdasmen.go.id/news/peran-hubungan-masyarakat-dalam-
meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-instansi-pemerintah](https://ppg.dikdasmen.go.id/news/peran-hubungan-masyarakat-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-instansi-pemerintah),
diakses pada tanggal 05 Maret 2025

